

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2,834,032,992	45	771,362,306	1	1,917,272,624	0.761172	2,157,186,501	0.860694	2,439,235,161				
		Sub Kegiatan															
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100	184,950,000	16.90	31,258,033	0.38	71,014,609	0.5761041	106,550,462	0.886269	163,915,410	18.75	372,738,514.00	18.75	201.5347467
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	2,649,082,992	27.94	740,104,273	0.70	1,846,258,015	0.7740928	2,050,636,039	0.858908	2,275,319,751	30.27	6,912,318,078.00	30.27	260.9324849
1.4		Kegiatan								#DIV/0!				#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100	1,201,002,000	14	120,773,000	1	355,644,060	0.4724216	567,379,310	0.709294	851,864,075	15.94	1,895,660,445.00	15.94	157.8399074
		Sub Kegiatan								#DIV/0!				#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100	1,117,872,000	10.54	117,773,000	0.30	334,186,160	0.4811467	537,860,460	0.723515	808,797,377	12.04	1,798,616,997.00	12.04	160.8965067
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Aset /sarana dan prasarana yang siap digunakan		1,280,000	0.00	-	0.00	-		-	0	-				
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset /sarana dan prasarana yang siap digunakan	100	81,850,000	3.67	3,000,000	0.26	21,457,900	0.3606457	29,518,850	0.526166	43,066,698	4.81	97,043,448.00	4.81	118.562551
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor yang layak pakai	100	-		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-		-		#DIV/0!
2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100	874,604,000	50	90,870,000	-	296,058,000	0.5107274	446,684,186	0.943701	825,364,656	51.32	1,658,976,842.00	51.32	189.6831986
2.1		Kegiatan								#DIV/0!				#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	100	407,317,000	41	49,620,000	0	128,988,000	0.5079533	206,898,000	0.882982	359,653,506	42.57	745,159,506.00	42.57	182.9433846
		Sub Kegiatan								#DIV/0!				#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	127,290,000	3.68	4,680,000	0.14	17,280,000	0.215885	27,480,000	0.998822	127,140,000	5.03	176,580,000.00	5.03	138.7226019
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	120,282,000	37.36	44,940,000		78,363,000	0.9450541	113,673,000	0.996932	119,913,000				
		Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		150,945,000	0.00			33,345,000		65,745,000		112,600,506				
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		8,800,000	0.00											
2.2		Kegiatan								#DIV/0!				#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	100	467,287,000	9	41,250,000	0	167,070,000	0.5131454	239,786,186	0.996628	465,711,150	10.69	913,817,336.00	10.69	195.5580481
		Sub Kegiatan								#DIV/0!				#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!

	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ditertibkan	100	467,287,000	8.83	41,250,000	0.36	167,070,000	0.5131454	239,786,186	0.996628	465,711,150	10.69	913,817,336.00	10.69	195.5580481
													0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
													0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Rata - rata capaian kinerja (%)															#DIV/0!	204.60
Predikat Kinerja															#DIV/0!	SANGAT TINGGI
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :1. Tersedianya regulasi sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Tersedianya sumber dana dan sumber daya aparatur serta integritas dan kesigapan para petugas khususnya (PPNS) dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dilapangan.</p> <p>Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Kompetensi dan jumlah aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum optimal dalam melayani tuntutan masyarakat di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. (2) Belum optimalnya sinergitas antar Perangkat Daerah penginisiasi Perda dengan Satpol PP (3) Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada;</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **) :untuk gaji dan tunjangan ASN akan dilakukan penyesuaian / rekon di perubahan 2026</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya **) :akan melakukan rasionalisasi jika terdapat rancangan barang yang tidak dapat direalisasikan</p>																

Denpasar, 2 Januari 2026

